

Lampiran Surat Pengantar
 No:
 Perihal: Pokok-Pokok Pikiran
 DPRD (Komisi (1-4) Untuk
 RKPD Tahun 2024

NO.	BIDANG	POKOK PIKIRAN
1.	Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan	<p>PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan. b. Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan. c. Terpenuhinya sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya di kecamatan dan di kelurahan d. Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. e. Penataan wilayah terkait pemekaran ataupun penggabungan RT/RW/Kelurahan. f. Penganggaran untuk Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kelurahan dan Kecamatan sesuai RPJMD. g. Pendataan secara aktif tentang keluarga miskin, pemukiman kumuh (RTLH). h. Dalam setiap proses kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan pihak ketiga wajib melibatkan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. i. Proses kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyangkut fasilitas umum di perbatasan agar dilanjutkan dengan output yang rill dan jelas. j. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal. <p>HUKUM DAN HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Daerah ke masyarakat. b. Tersedianya data base tentang Produk-produk Hukum baik Peraturan daerah dan Perwalinya. c. Menyelesaikan Penyusunan/Pembahasan Raperda termasuk NA sesuai dengan rencana kerja. d. Menverifikasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau Peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. e. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia. f. Mengkoordinasikan penanganan kasus kasus, khususnya yang menyangkut sengketa dengan Pemerintah Daerah dan menyangkut aset daerah secara periodik kepada DPRD, khususnya Komisi I. g. Melakukan evaluasi secara periodik program bantuan hukum warga miskin kepada DPRD, dalam rangka peningkatan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. h. Pelaksanaan FGD maupun Diskusi Kelompok Terbatas yang menyangkut persoalan hukum supaya melibatkan DPRD.

- i. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.

KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.
- c. Memberikan TPP bagi ASN secara konsisten dan tepat waktu.
- d. Penerapan sistem Reward dan punishment secara konsisten.
- e. Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas ASN.
- f. Mempersiapkan kepegawaian sesuai ASN berdasarkan pangkat, golongan, pendidikan dan keahliannya.
- g. Rekrutmen TKDPK di setiap OPD wajib didasarkan pada Perda tentang TKDPK, yang prosesnya harus melibatkan DPRD sesuai Komisi mitra kerja
- h. Menerapkan sistem informasi kepegawaian.
- i. Proses mutasi dan rotasi ASN perlu didasarkan pada mekanisme assesment dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- j. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- a. Meningkatkan pembinaan, penertiban terhadap hunian di tanah negara, Pedagang Kaki Lima, Pengamen dan Gelandangan secara preventif maupun represif.
- b. Terselenggaranya operasi yustisi
- c. Meningkatkan dan melakukan pembinaan Linmas wilayah maupun kota untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
- d. Meningkatkan kegiatan – kegiatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, khususnya Perda tentang pendirian bangunan gedung (PBG) dan pemondokan.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Tersediaanya data base kependudukan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana bagi defabel.
- e. Tersedianya blanko e-KTP.
- f. Meminta Pemerintah Pusat untuk bisa mendelegasikan pengadaan blanko e-KTP kepada Daerah.
- g. Menambah Mobil Keliling untuk pelayanan masyarakat.
- h. Meningkatkan kinerja SDM petugasnya.
- i. Program yang sudah berjalan agar ditingkatkan.
- j. Mensosialisasikan program yang sudah dicanangkan kepada warga masyarakat dan stakeholder.

- k. Pembuatan akte administrasi kependudukan yang dilakukan secara online harus di backup secara manual.
- l. Mengoptimalkan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses secara online.
- m. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan seluruh program dan kegiatan.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- a. Membuat program dan kegiatan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas politik, sosial, keamanan Kota.
- b. Meningkatkan program dan kegiatan yang bertujuan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama.
- c. Meningkatkan peran Lembaga / Stakeholders dalam rangka mengantisipasi, mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama.
- d. Meningkatkan kegiatan dalam rangka menjaga kondusifitas antar partai politik di Kota Surakarta.
- e. Mengadakan sosialisasi tentang peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai tingkat warga masyarakat bawah.
- f. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.

PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi pelayanan publik di MPP.
- c. Memastikan ketersediaan fasilitas di MPP yang berbasis IT.
- d. Menyediakan pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di Dinas PMPTSP/MPP
- e. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan perijinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi jejaring serta koordinasi dengan instansi terkait.
- g. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- a. Mewujudkan Solo Smart City melalui Solo Destination.
- b. Mewujudkan Big Data.
- c. Memastikan ketersediaan dan kecepatan informasi yang diperlukan antar OPD maupun masyarakat umum.
- d. Meningkatkan jaringan informasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik (Jaringan Internet antara OPD dan Instansi terkait)
- e. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.

		<p>PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjaga integritas sumber daya manusia yang menjalankan tugasnya di BPJB. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan publik. Membuka layanan pengaduan. Outcome prosentase kegiatan pengadaan barang & jasa melalui e – procurement dan e-katalog. Memastikan ketersediaan anggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan secara optimal.
2.	Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan	<p>KOPERASI DAN UKM DAN PERINDUSTRIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya 8,60 % pertumbuhan UMKM (Target RPJMD 2021-2026). Terwujudnya 10% UMKM menjadi UKM Terwujudnya 7,5 % pertumbuhan IKM Meningkatnya koperasi yang berkualitas (aktif) sebesar 53,38 % (Target RPJMD 2021-2026). Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 15 % Tercapainya persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam Rencana Induk Pembangunan Industri nasional (RIPIN) yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) sebesar 100 % (Target RPJMD 2021-2026). Tercapainya persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebesar 80 % Adanya Update data jumlah UKM Klaster atau pengelompokan yang ada di Kota Surakarta. Mendorong adanya bantuan modal usaha bagi masyarakat. Pengadaan pelatihan UKM bagi masyarakat yang diadakan di tiap tiap kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Adanya Penguatan untuk permodalan Koperasi yang ada di Kota Surakarta. Mendata dan membantu untuk pendaftaran IRT, BPOM dan sertifikasi halal bagi produsen lokal. <p>PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan sebesar 30,96 % Tercapainya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan sebesar 100 % (Target RPJMD 2021-2026). Tercapainya persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 99,99% (Target RPJMD 2021-2026). Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 66,66 % (Target RPJMD 2021-2026). Standarisasi dan peningkatan kapasitas lurah pasar sehingga mampu mengelola pasar secara profesional.

- f. Optimalisasi dan inovasi terhadap pasar tradisional dalam menarik pembeli.
- g. Adanya workshop manajemen dan marketing bagi pedagang yang ada di pasar.
- h. Segera mewujudkan master plan kawasan PKL sebagai prioritas utama.
- i. Di dalam mengirim peserta pameran perdagangan diharapkan bisa melakukan seleksi yang selektif dan tepat sasaran.
- j. Pameran yang representatif dengan memajang produk unggulan yang dijual di pameran tersebut.
- k. Penarikan retribusi dengan e-retribusi secara menyeluruh yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
- l. Peningkatan *marketing On line* di setiap pasar yang ada.
- m. Peningkatan usaha berbasis ekonomi kreatif.
- n. Peningkatan perdagangan ekspor.
- o. Melaksanakan kegiatan tera ulang secara berkala.
- p. Monitoring, antisipasi dan operasi pasar terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.
- q. Penyempurnaan pembinaan manajemen/pengelolaan kawasan kuliner.
- r. Pendataan penempatan kios-kios pasar secara periodik.
- s. Monitoring UMK yang mengikuti pameran agar yang mengikuti pameran tidak hanya itu terus tetapi tambah yang lain.
- t. UMKM Catering difungsikan untuk berperan dalam penyediaan jasa konsumsi rapat di dinas (Catering per kelurahan)
- u. Terwujudnya pasar mebel yang baru sebagai pengganti pasar mebel Gilingan

BADAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Tercapainya tingkat kemandirian Keuangan Daerah sebesar 50 %
- b. Persentase kenaikan PAD sebesar 10 %
- c. Rasio PAD sebesar 2 %
- d. Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD sebesar -20 % (Target RJMD 2021-2026)
- e. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib hukumnya tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan pemisahan OPD di bidang pendapatan, serta wajib dilaporkan ke DPRD setiap triwulan
- f. Evaluasi tentang kinerja pada sektor pendapatan retribusi daerah yang menggunakan system elektronik, wajib dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulan ke DPRD
- g. Peningkatan tata kelola keuangan yang optimal untuk mendukung peningkatan PAD.
- h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor Pendapatan Asli Daerah per triwulan.
- i. Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen dan dilaporkan secara terstruktur.
- j. Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.
- k. Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak dan Retribusi diwujudkan secara online dengan pengadaan alat elektronik secara menyeluruh.
- l. Penyempurnaan program online atas pajak dan retribusi

- m. Ketaatan dan ketertiban pembayaran pajak atas belanja daerah bagi seluruh SKPD Kota Surakarta sebesar 100 %.
- n. Pelayanan BPHTB yang prima.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- a. Tercapainya indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kategori A (Target RJMD 2021-2026)
- b. Tercapainya opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan kategori WTP (Target RJMD 2021-2026)
- c. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan sebesar 15 % (Target RJMD 2021-2026)
- d. Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) sebesar 32 % (Target RJMD 2021-2026)
- e. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD sebesar -14 % (Target RJMD 2021-2026)
- f. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar -14 % (Target RJMD 2021-2026)
- g. Perencanaan dan penggunaan anggaran belanja harus betul-betul yang matang dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat untuk semua Perangkat Daerah
- h. Diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan serius dari pemerintah Kota Surakarta untuk pengamanan (termasuk penyertifikatan), penataan, pendataan dan pemanfaatan aset kota.
- i. Terkoneksinya jaringan data base dan sistem serta peta pertanahan antara BPN dan BPKAD.
- j. Mendorong BPKAD sebagai leading sektor pendapatan untuk mewujudkan Sistem Peta Digital.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

- a. Tercapainya jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota sebesar 45,2 % (Target RJMD 2021-2026)
- b. Tercapainya produktivitas pertanian per hektar per tahun sebesar 64% (Target RJMD 2021-2026)
- c. Tercapainya persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 75 % (Target RJMD 2021-2026)
- d. Tercapainya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi sebesar 90,2 % (Target RJMD 2021-2026)
- e. Tercapainya skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,9 % (Target RJMD 2021-2026)
- f. Tercapainya ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) sebesar 15 % Tercapainya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi sebesar 90,2 % (Target RJMD 2021-2026)
- g. Perlunya kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat.
- h. Perlunya kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Pendidikan untuk outingclass untuk pertanian dan gizi.
- i. Pemanfaatan lahan tidur untuk pengembangan usaha produktif pertanian dan perikanan.
- j. Membudayakan hemat makanan dari bahan beras dan melakukan diversifikasi sumber bahan makan pokok non beras.
- k. Optimalisasi kampung sayur dan Tanaman Obat – obatan Keluarga (toga) serta tanaman buah dengan memberdayakan lembaga-lembaga di tingkat Kelurahan.

		<p>l. Pemanfaatan lahan sempit untuk pembudidayaan sayuran dan budidaya ikan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan (penghasilan) bagi masyarakat kota Surakarta.</p> <p>m. Monitoring peredaran daging di rumah makan-rumah makan di kota Surakarta.</p> <p>n. Budaya makan ikan sehat digalakkan.</p> <p>PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)</p> <p>a. Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak minum (konsumsi) dan layak pakai untuk masyarakat.</p> <p>b. Menjalinkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Surakarta.</p> <p>c. Menekan tingkat kebocoran air.</p> <p>d. Peningkatan profesionalisme dalam mengelola perusahaan maupun dalam melayani masyarakat.</p> <p>e. PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Surakarta.</p> <p>f. Memperluas jaringan online untuk pembayaran.</p> <p>g. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang complain dengan sistem SIGAP (Singkat, tanggap, cepat)</p> <p>h. Ekstensifikasi dan intensifikasi penagihan piutang.</p> <p>i. Peningkatan pendapatan melalui AMDK.</p> <p>PERUSAHAAN DAERAH TSTJ</p> <p>a. Optimalisasi Pengelolaan Perumda TSTJ serta evaluasi terhadap pengelolaan Perumda TSTJ.</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi dan tujuan didirikannya Perumda TSTJ.</p> <p>c. Kerjasama dengan pihak ketiga harus punya nilai manfaat dan memperhatikan nilai konservasi, edukasi dan rekreasi.</p> <p>d. Kerjasama bagi sekolah, budaya cinta satwa.</p> <p>PD. PPK PEDARINGAN</p> <p>a. Optimalisasi pendapatan sesuai dengan bidang usaha yang dikelola (Pom Bensin, Pergudangan, Transportasi Distribusi Barang)</p> <p>b. Tata Kelola keuangan PAU Pedaringan secara professional</p> <p>c. Kajian Potensi pendapatan oleh pihak independent dan dilaporkan secara terstruktur</p> <p>PD. BKK PASAR KLIWON</p> <p>a. Peningkatan perbaikan kinerja pengelolaan PD. BKK Pasar Kliwon.</p> <p>b. Memberikan prioritas permodalan dan pengembangan usaha mikro.</p> <p>c. Monitoring Evaluasi</p> <p>PD. BANK SOLO</p> <p>a. Peningkatan perbaikan kinerja pengelolaan PD. Bank Solo agar lebih profesional dalam melayani masyarakat umum.</p> <p>b. Memberikan prioritas permodalan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.</p> <p>c. Mempermudah Prosedur pinjaman nasabah konsumtif dan produktif agar mampu bersaing dengan produk Pinjaman Bank Nasional</p>
--	--	---

3.	Komisi III : Infrastruktur	<p>BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pembangunan harus visioner berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan skala prioritas yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi di lapangan. b. Meningkatkan koordinasi antar OPD agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah ubah. c. Terintegrasinya program antara Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. d. Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat, berkesinambungan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, jangka panjang daerah. e. Terciptanya database kota secara akurat dan up to date/terkini. f. Lebih cermat dalam merencanakan pendataan keluarga miskin dan selalu upgrade datanya selama 6 bulan. g. Terintegrasi data jumlah penduduk, jumlah keluarga miskin dan data lain serta dilaporkan pada Komisi III DPRD Kota Surakarta tiap update data (setiap 6 bulan). h. Memaksimalkan program SIPPD yang berkaitan dengan pokir DPRD dengan memberikan akses masuk pada sistem SIPPD kepada setiap Anggota DPRD. <p>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Segera mewujudkan master plan drainase dan sungai sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka pengurangan banjir. b. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan drainase agar dapat berfungsi secara maksimal dan berdasarkan master plan. c. Segera melaksanakan penegakan Peraturan Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait penggunaan/penutupan drainase. d. Meningkatkan pemeliharaan jalan kota secara merata. e. Sosialisasi pemetaan dan antisipasi terhadap kerawanan bencana banjir agar berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait. f. Dalam pelaksanaan seluruh pembangunan fisik, dilakukan oleh OPD yang mempunyai kompetensi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. g. Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi dan selalu aktif dalam berkoordinasi secara rutin. h. Memaksimalkan pengawasan pembangunan dan penegakan Peraturan Daerah sehingga semua bangunan sesuai dengan RTRW, RDTR maupun RTBL. i. Perencanaan Drainase Kota yang terintegrasi dengan mengakomodir instalasi yang lain seperti di Jl. Gatot Subroto.
----	-------------------------------	---

		<p>j. Membuat perencanaan secara terpadu, utilitas, saluran PDAM, Telepon juga dibuat sumur resapan seperti di Jl. Gatot Subroto.</p> <p>k. Terlaksananya program terkait jalan, jembatan dan drainase, serta kawasan perbatasan sesuai target RPJMD Tahun 2021-2026.</p> <p>l. Memaksimalkan penataan kawasan Solo Utara sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021.</p> <p>MANAJEMEN LALU LINTAS (DINAS PERHUBUNGAN)</p> <p>a. Tercapainya Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum sebesar 100% sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Perhubungan Nomor 10 Tahun 2022.</p> <p>b. Tersedianya halte yang representative pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.</p> <p>c. Persentase pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi sebesar 100%.</p> <p>d. Memaksimalkan moda transportasi umum sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Perhubungan Nomor 10 Tahun 2022.</p> <p>e. Prosentase 100 % operasional koridor BST yang terlayani.</p> <p>f. Kajian manajemen lalu lintas secara menyeluruh dan periodik berdasar pada perkembangan kendaraan bermotor, pesepeda, dan perkembangan kota.</p> <p>g. Penataan Manajemen Rekayasa Lalu lintas yang komprehensif untuk menghadapi semakin ruwetnya kemacetan di Kota Surakarta serta menurunkan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas.</p> <p>h. Membuat grand design tentang parkir yang terintegrasi dengan semua moda transportasi.</p> <p>i. Penataan, penertiban dalam pelaksanaan parkir sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Perhubungan Nomor 10 Tahun 2022.</p> <p>j. Penguatan peran Dinas Perhubungan untuk menuju Smart City.</p> <p>k. Segera merealisasikan meterisasi PJU secara menyeluruh.</p> <p>l. Melakukan pemeliharaan, pengawasan dan penertiban secara berkala terhadap penggunaan penerangan jalan umum.</p> <p>m. Pembinaan dan pengaturan transportasi tidak bermesin sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Perhubungan Nomor 10 Tahun 2022.</p> <p>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air (mewujudkan satu juta biopori) dan menuju ruang terbuka hijau (RTH) publik 20%.</p> <p>b. Peningkatan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pola hidup sehat serta ramah lingkungan.</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang berskala kecil (Komunil). d. Memelihara dan mengembangkan kampung iklim secara bertahap dan kongkrit. e. Meningkatkan pemeliharaan dan menambah kawasan hutan kota. f. Melakukan koordinasi secara intens dengan seluruh OPD agar tahun 2023 bisa meraih Adipura kencana. g. Pemeliharaan pohon secara rutin termasuk untuk pemangkasan dahan secara berkala. h. Pengoptimalan fungsi rumah pembibitan tanaman untuk taman kota. <p>BIDANG PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait maupun kementerian terkait untuk mewujudkan program 100-0-100. b. Melakukan pendataan secara menyeluruh atas rumah tidak layak huni. c. Melakukan pembinaan/Pengawasan terhadap program RTLH. d. Dalam melakukan pembangunan/perawatan jalan lingkungan yang rusak ringan, sedang, berat dan berdasarkan skala prioritas. e. Meningkatkan percepatan pelaksanaan Sistem sapu lubang. f. Melakukan sosialisasi tentang program prona dan proda. g. Menambah jumlah realisasi penataan kawasan kumuh sesuai dengan regulasi. h. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun Rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi. i. Inventarisasi jumlah jalan lingkungan dan drainase yang sudah baik dan belum, serta klasifikasinya. j. Pemeliharaan penerangan di pemakaman. k. Merencanakan penataan lahan dan penambahan lahan untuk makam. l. Meningkatkan pengamanan dan pengawasan lahan TPU kota dari hunian liar dengan memberi batas pagar. m. Menertibkan hunian liar di area lahan TPU kota. <p>BIDANG PEMADAM KEBAKARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran. b. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana Kebakaran. c. Peningkatan pelatihan pada masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran. d. Menciptakan sistem proteksi terhadap bencana kebakaran. e. Terciptanya standar keamanan penanggulangan bencana kebakaran di setiap bangunan. f. Inventarisasi pemetaan daerah rawan kebakaran.
--	--	---

		<p>g. Pemeriksaan dan pengecekan hydrant secara berkala.</p> <p>h. Mewujudkan 5 titik Pos pemadam dimasing-masing Kecamatan.</p> <p>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>a. Penambahan sumber daya manusia.</p> <p>b. Penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.</p> <p>c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat dalam penanganan bencana.</p> <p>d. Meningkatkan dan menambah sistem peringatan dini/proteksi yang merata terhadap bencana.</p> <p>e. Pemetaan wilayah rawan bencana.</p> <p>f. Kesiapsiagaan petugas selama 24 jam.</p> <p>g. Update informasi berita bencana terkini.</p> <p>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)</p> <p>a. Pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>b. Perumusan kebijakan terkait penelitian dan pengembangan.</p> <p>c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penelitian dan pengembangan.</p> <p>d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penelitian dan pengembangan.</p> <p>e. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepagawaian dan organisasi.</p> <p>f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>g. Membuat jurnal.</p>
--	--	---

4.	Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Masyarakat	<p>Kebudayaan dan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kebudayaan mendorong kegiatan budaya di kelurahan b. Perlu perhatian terhadap substansi even yang diselenggarakan: misalnya menambahkan workshop tentang batik ke dalam rangkaian Solo Batik Carnival dalam rangka Bulan Batik, Solo Menari c. Meningkatkan promosi setiap event kebudayaan dan pariwisata d. Pendataan dan anggaran pemeliharaan/ perawatan terhadap cagar budaya yang di miliki pemerintah e. Peningkatan kualitas even religi HAUL dan Pelayanan panitia sehingga meminimalisir dampak sosial, area peziarah diperluas dengan batas-batas pemisahan yang tegas antara area peziarah dan pedagang f. Mendorong dan memprakarsai agar pelaku seni budaya tradisi mendapat ruang publik untuk mengembangkan kegiatan budaya . g. Penyelenggaraan even budaya di Kota Surakarta h. Mendorong pihak hotel untuk memberikan paket wisata budaya i. Mendorong setiap OPD dan instansi swasta untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan budaya j. Penganggaran pemeliharaan warisan budaya Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran <p>DKK, RSUD</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan cakupan jumlah penerima BPJS Kesehatan baik mandiri maupun PBI mencapai 100% b. Memastikan pasien BPJS kelas 3 untuk mendapatkan kamar c. Mengoptimalkan jaringan sistem informasi ketersediaan kamar semua kelas di semua Rumah Sakit d. Mendorong rehabilitasi, pengembangan RSUD dan puskesmas e. Pencegahan dan pendampingan kasus stunting menuju zero stunting f. Pencegahan dan pendampingan penderita TBC g. Bantuan fasilitas kesehatan (timbangan berat badan, alat tensi, dll) untuk Posyandu (posyandu Balita dan Lansia) <p>Dinas Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan hibah alat bantu untuk disabilitas b. Peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif untuk Rumah Singgah c. Rekrutment relawan untuk membantu pelayanan di Rumah Singgah d. Peningkatan produktivitas penyandang disabilitas melalui peningkatan kapasitas (keterampilan) e. Peningkatan pelatihan dan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi
----	--	--

		<p>f. Mendorong Dinas Sosial untuk selalu aktif mengupdate data terkait penonaktifan KIS APBN, PKH, KKS, BPNT</p> <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB</p> <p>a. Mendukung program Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak dengan memberikan payung hukum dengan menerbitkan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>b. Mendorong Dinas untuk selalu mengupgrade alat-alat Kesehatan yang ada di posbindu, posyandu balita dan posyandu lansia</p> <p>c. Meningkatkan akseptor KB</p> <p>d. Menekan angka kematian bayi lahir dan ibu melahirkan</p> <p>e. Menekan angka stunting pada anak golden age (0 – 3 tahun)</p> <p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</p> <p>a. Peningkatan promosi Perpustakaan Daerah, sebagai bentuk kecintaan pelajar pada budaya baca di sekolah</p> <p>b. Peningkatan jumlah buku perpustakaan daerah sehingga mampu memberikan wawasan keilmuan yang lebih reepresentatif bagi pengunjung di perpustakaan daerah</p> <p>c. Memberikan layanan baca bagi pengunjung yang mengalami tuna netra, dengan menyediakan komputer dengan huruf braile.</p> <p>d. Peningkatan disiplin kearsipan di tiap OPD</p> <p>e. Digitalisasi arsip dinamis maupun arsip statis</p> <p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>a. Mensinergikan antara komite sekolah, sekolah, dan orang tua siswa dalam kerangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Surakarta</p> <p>b. Meningkatkan akurasi inputing Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk menghindari kegagalan bayar oleh bank dalam program BPMKS.</p> <p>c. Evaluasi dan monitoring bagi guru yang bersertifikasi, khususnya dalam hal tugas pokok dan fungsi guru</p> <p>d. Rehabilitasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Semanggi</p> <p>e. Pematangan konsep Sekolah Adiwiyata SD dan SMP</p> <p>f. Mendorong Dinas Pendidikan untuk bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengagendakan semua siswa berkunjung ke museum dan tempat budaya</p>
--	--	--

		<p>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan elemen organisasi pemuda (OSIS, PRAMUKA, dll) dalam rangka peningkatan nilai kesetiakawanan, nilai kebhinnekaan dan semangat terhadap keutuhan NKRI. Peningkatan prestasi akademik, olah raga dan seni budaya di kalangan pelajar dan pemberian penghargaan/beasiswa. Optimalisasi keberadaan KONI dalam rangka pembinaan olah raga bagi masyarakat Surakarta serta peningkatan prestasi olahraga. Meningkatkan kualitas Kelas Khusus Olahraga menuju realisasi Sekolah Khusus Olahraga. Menyiapkan lulusan Kelas Khusus Olahraga (SMP) ke jenjang berikutnya. Mendorong Dinas untuk memberikan pembinaan kepada Karang Taruna Indonesia sampai tingkat RT <p>DINAS TENAGA KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dalam hal transmigrasi, harus mengkaji lebih matang agar lokasi transmigrasi yang akan dijadikan tempat transmigrasi bagi para calon transmigran tidak ada masalah sengketa lahan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi para transmigran Meningkatkan pelatihan untuk menjadikan tenaga kerja siap pakai dan mandiri berbasis kebutuhan masyarakat dan menjadi mitra kerja OPD Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Peningkatan kesempatan kerja dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja. <p>REKOMENDASI TAMBAHAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong terjalannya koordinasi antara pemangku kebijakan terkait urusan bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan, BPJS , Dinas Sosial dan Dukcapil)
--	--	---

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta**

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P

